



POKOK-POKOK PERKEMBANGAN PERSIAPAN PEMBANGUNAN IKN DAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA


Forum Konsultasi Publik
Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

Jakarta, 15 Februari 2022

Master Plan Ibu Kota Negara

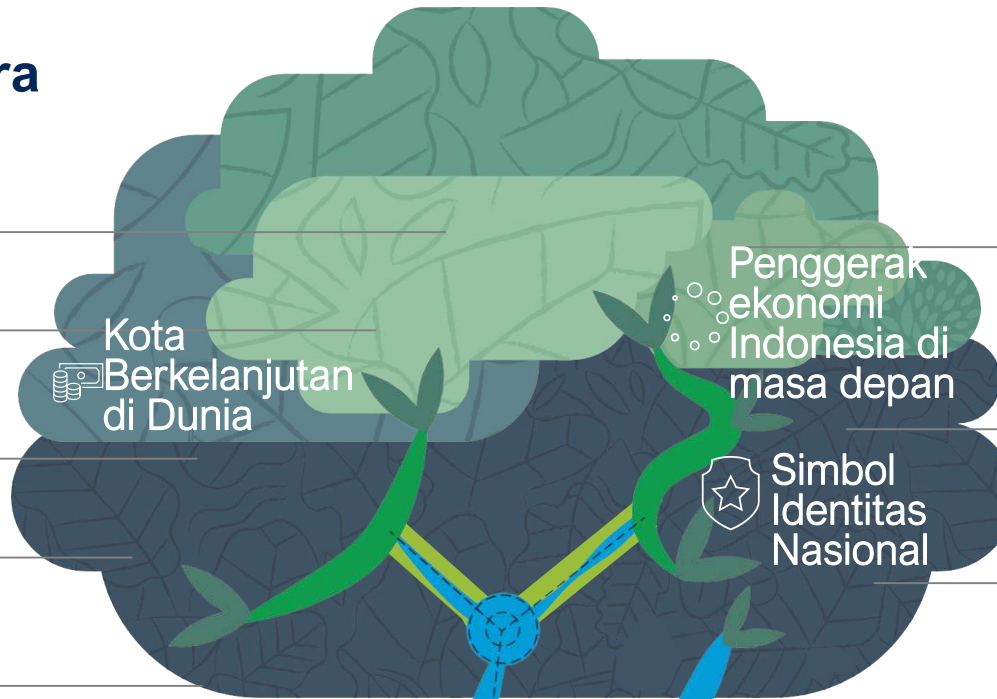
Visi Ibu Kota Nusantara

-  Aman dan terjangkau
-  Selaras dengan Alam
-  Terhubung, Aktif & Mudah Diakses
-  Sirkuler dan Tangguh
-  Pembangunan IKN yang rendah emisi karbon

Peluang ekonomi tangguh untuk semua 

Nyaman & efisien melalui teknologi & inovasi 

Keindahan Indonesia – Bhinneka Tunggal Ika 



KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

ENABLER



Public Private Partnership (PPP)

Kolaborasi tri-kota

Sektor prioritas masa depan

Infrastruktur dan konektivitas pintar

Otorita IKN

Pemerintahan efektif dan efisien

Kota layak huni

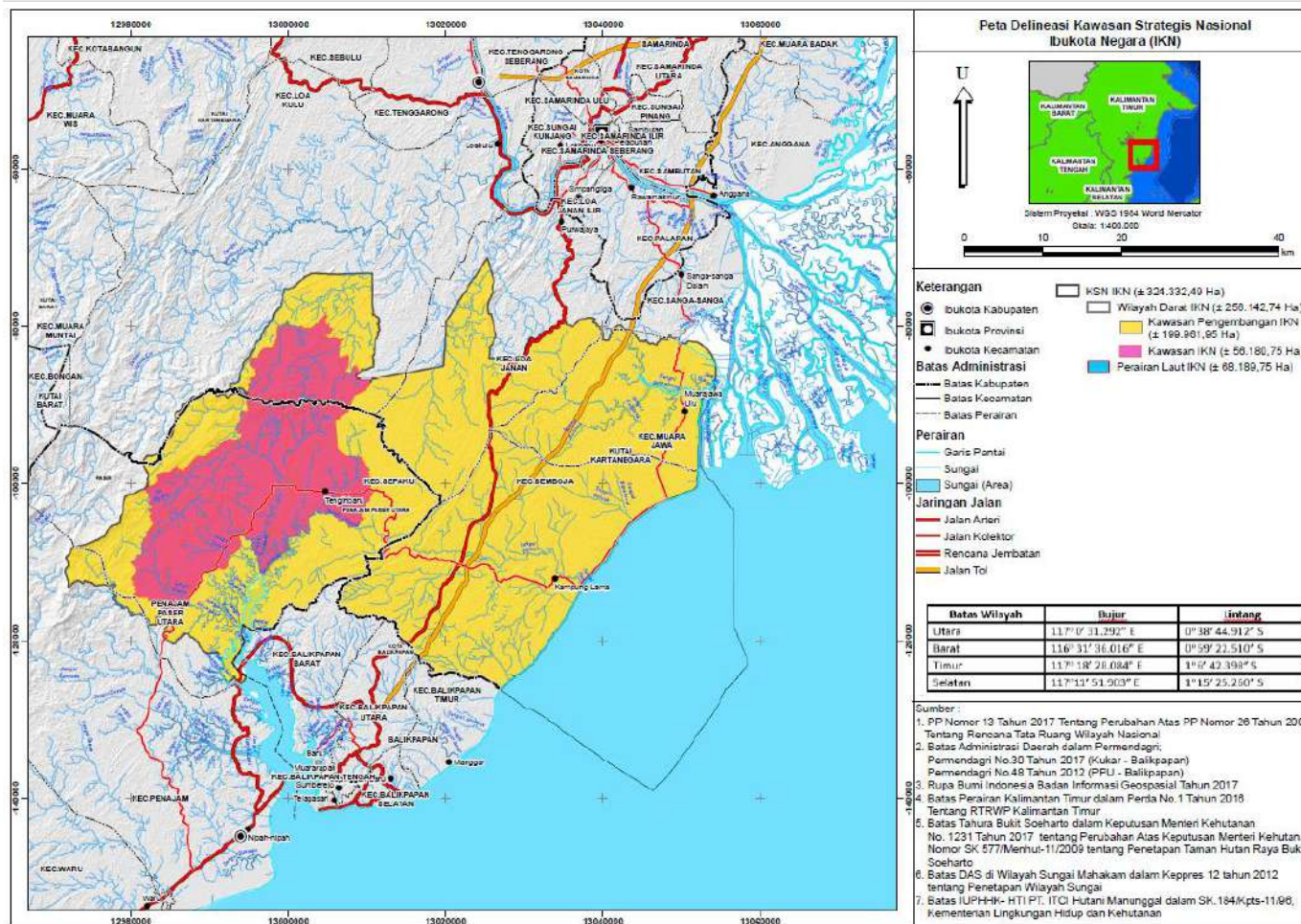
ENABLER



8 Prinsip dan 24 KPI IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua

1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler & Tangguh	6. Aman & Terjangkau	7. Nyaman & Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua
<p>1.1 >75% dari 256.000 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan)</p> <p>1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit</p> <p>1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)</p>	<p>2.1 100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru</p> <p>2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial / masyarakat dalam waktu 10 menit</p> <p>2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif</p>	<p>3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif</p> <p>3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik</p> <p>3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030</p>	<p>4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN</p> <p>4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung</p> <p>4.3 Net zero emission untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256.000 Ha</p>	<p>5.1 >10% dari lahan 256.000 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan</p> <p>5.2 60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045</p> <p>5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035</p>	<p>6.1 Top-10 EIU Liveable City di dunia pada tahun 2045</p> <p>6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.000 memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045</p> <p>6.3 Perumahan layak, aman dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang (1:2:3) untuk jenis mewah, menengah dan sederhana</p>	<p>7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam <i>E-Government Development Index (EGDI)</i> oleh UN</p> <p>7.2 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis</p> <p>7.3 >75% Business Satisfaction dengan peringkat <i>Digital Services</i></p>	<p>8.1 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035</p> <p>8.2 PDRB per kapita negara berpendapatan tinggi</p> <p>8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045</p>

Deliniasi Wilayah IKN



Ruang Lingkup Wilayah

Secara administratif, wilayah IKN terletak di **dua Kabupaten eksisting yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara** (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan **Kabupaten Kutai Kartanegara** (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).

Wilayah IKN berada di sebelah Utara Kota Balikpapan dan sebelah Selatan Kota Samarinda dengan luasan **wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare** dan luasan **wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare**.

Pengembangan wilayah **IKN** terbagi atas **tiga wilayah perencanaan**, yakni:

1. **Kawasan Pengembangan IKN (KP IKN)**, dengan luas wilayah kurang lebih **199.962 hektare**.
2. **Kawasan IKN (KIKN)**, dengan luas wilayah kurang lebih **56.180 hektare**.
3. **Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)**, yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah kurang lebih **6.671 hektare**.



Maloy (MBTK): ~300 km
utara Samarinda

Wilayah Kalimantan Timur
Lainnya

Samarinda

K-IKN

KIPP (Kawasan Inti
Pusat Pemerintahan)

Balikpapan

Area Perkotaan
Area Non Perkotaan

Selat Makassar

Overview Kawasan Ibu Kota Negara: Delineasi IKN kawasan 256.000 Ha dan K-IKN 56.000 Ha

Total Kawasan Pengembangan IKN (± 256.000 ha)

- Akan menjadi katalis untuk wilayah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan keunggulan kota Balikpapan dan Samarinda
- 75% kawasan IKN akan direncanakan menjadi ruang terbuka hijau dimana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan.
- IKN dikembangkan dengan 100% clean energy

Kawasan IKN (K-IKN) (± 56.000 ha)

- Terdiri dari berbagai zona *mixed-use* dan *neighborhood* yang mendukung konsep “10 menit berjalan kaki” dan konektivitas sosial
- Didesain selaras dengan alam, dengan minimal 50% ruang hijau
- 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif penduduk
- 100% pergantian ruang hijau untuk setiap bangunan

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) (± 6.600 ha)

- Kawasan pemerintahan nasional dan *smart government* (perkantoran).

IKN akan menjadi Kota yang Kompak, Efisien dan Sirkular

Hirarki Ruang Terbuka Hijau

75%

Area hijau di dalam 256 ribu ha yang terdiri dari 65% area yang dilindungi dan 10% area produksi pangan

50%

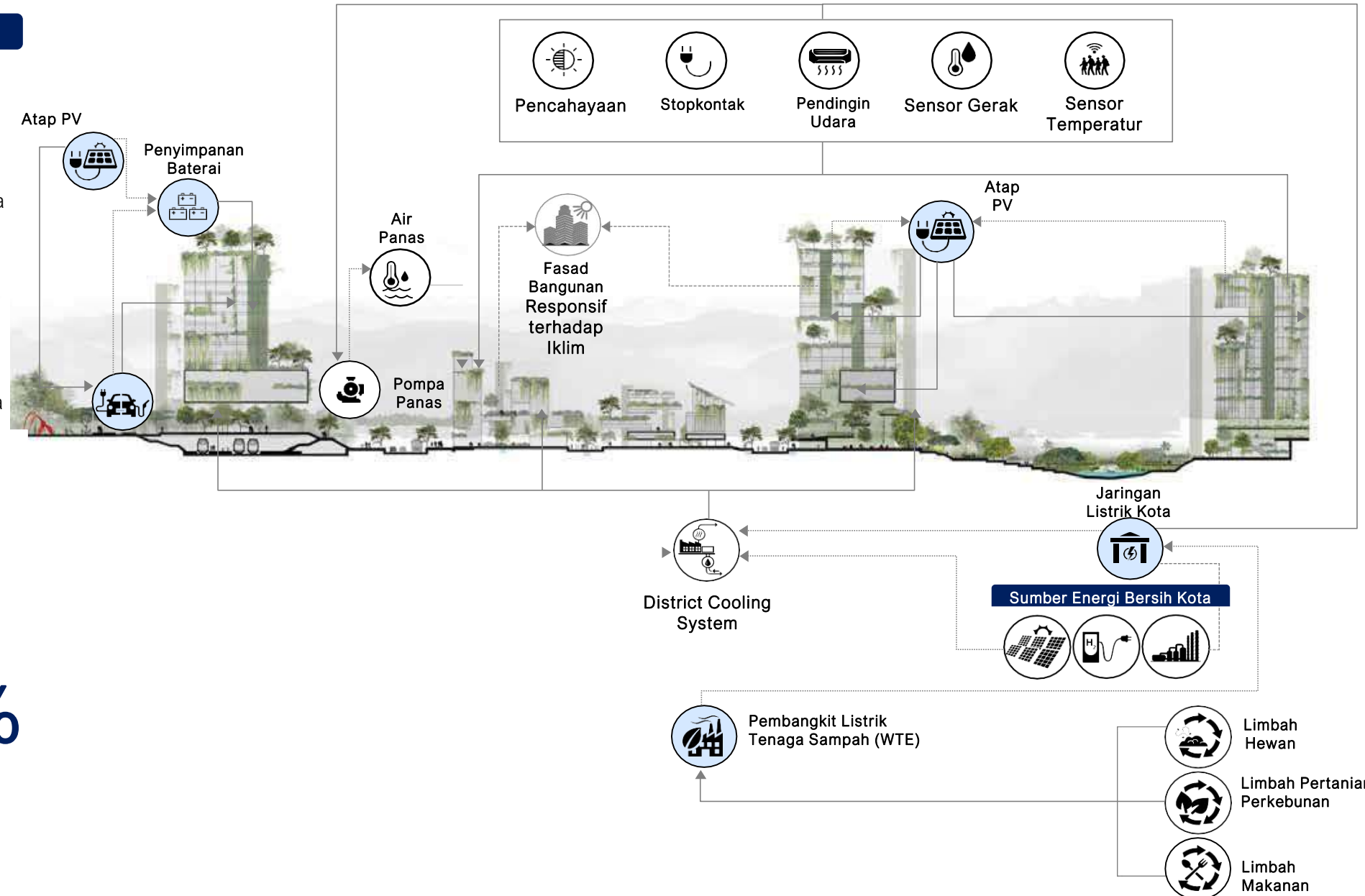
Ruang hijau terbuka di area seluas 56 ribu ha

60%

Ruang hijau dalam satu blok

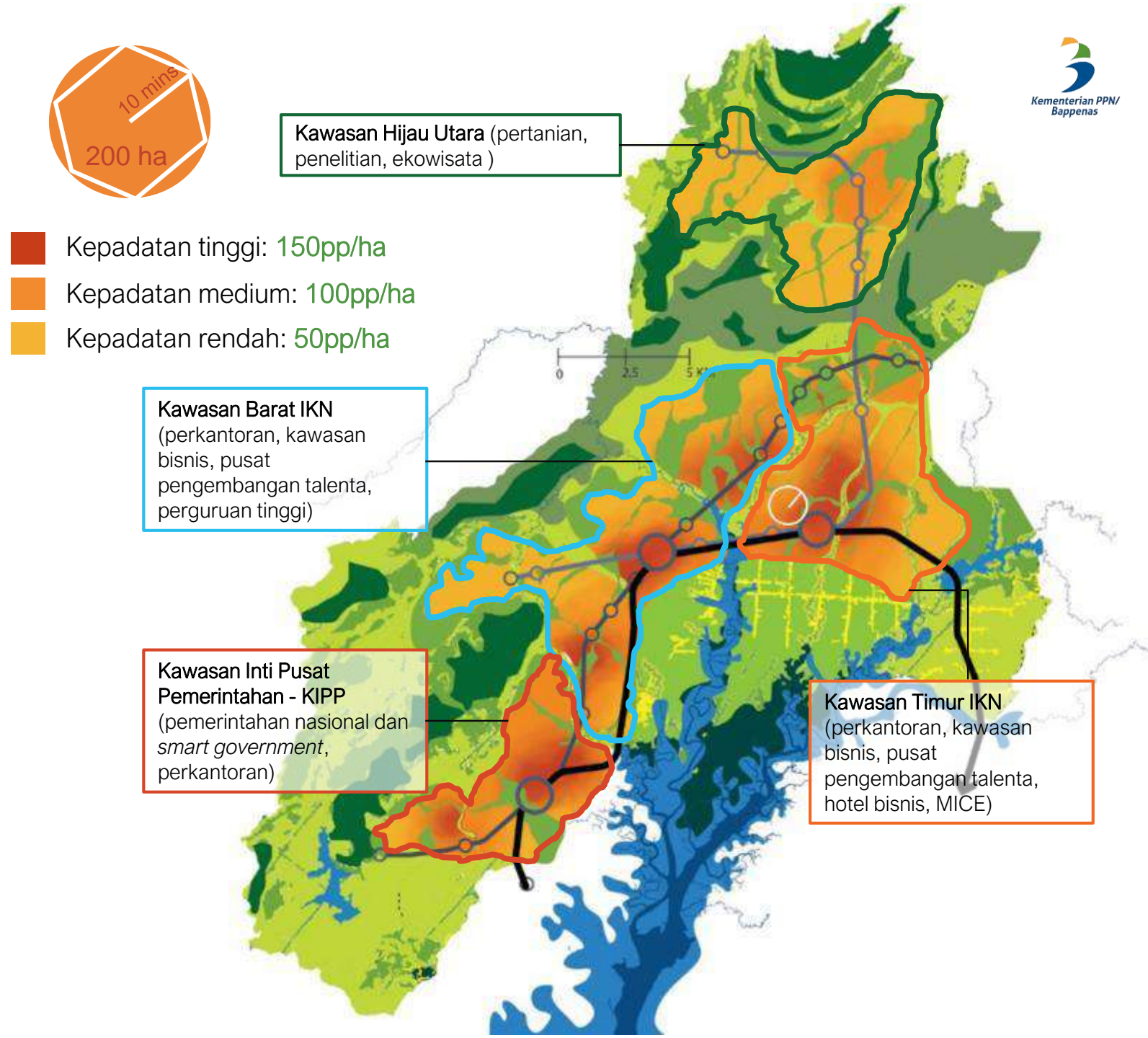
100%

Konstruksi ramah lingkungan untuk tiap bangunan dengan 4 lantai atau lebih



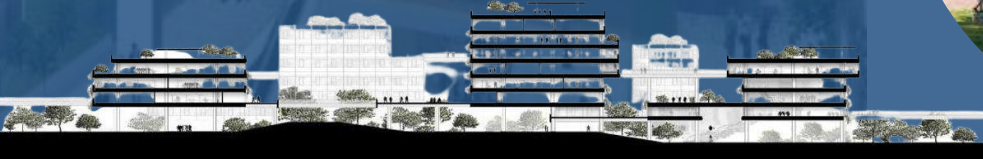
K-IKN (56k ha) terdiri dari berbagai zona mixed-use dan neighborhood yang mendukung konsep “10 menit berjalan kaki” dan konektivitas sosial

Kumpulan *neighborhood* (masing-masing berukuran 200 ha) yang berkembang di sekeliling area berkepadatan tinggi, dirancang dengan konsep “10 menit berjalan kaki” dan membentuk empat zona *mixed-use* dengan fokus dan keunikan karakteristik tersendiri



Ilustrasi Kawasan Ibu Kota Negara

K-IKN: Kota di dalam kawasan hutan, naungan 'hijau dan biru' yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat



- Harmoni dengan alam implementasi konsep *Sponge City* untuk menurunkan risiko banjir
- Mengutamakan pejalan kaki dan mobilitas aktif sehingga tidak macet dan masyarakat lebih sehat
- Contoh untuk kota dan perkotaan masa depan yang berkelanjutan, efisien dalam penggunaan sumber daya

Desain berkelanjutan ●

Mendukung konsep *walkability* ●

Kemudahan aksesibilitas ●

Sirkulasi angin ●

Area bebas kendaraan ●

Didukung fasilitas keamanan digital (mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat) ●

Didukung sistem *smart* dalam layanan perkotaan dan layanan pemerintahan ●



KIPP – Pusat pemerintahan dan kawasan permukiman

Perumahan ASN – dirancang dengan desain berkelanjutan, mendukung konsep *walkability* dan memfasilitasi hubungan sosial



PERATURAN PELAKSANAAN PRIORITAS UU IKN YANG HARUS SELESAI AKHIR MARET 2022 DAN K/L TERKAIT

PERATURAN PEMERINTAH

1. PP KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA

Status: Dalam proses pembahasan sejak Januari 2022

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian Setneg
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Investasi/BKPM

2. PP PENDANAAN DAN ANGGARAN

- i. Pendanaan untuk P3 IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- ii. Rencana Kerja dan Anggaran Otorita IKN;
- iii. Pengelolaan BMN dan aset dalam penguasaan;
- iv. Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara;
- v. Pengalihan pelaksanaan pembangunan dan BMN dari K/L kepada Otorita IKN

Status: Dalam proses pembahasan sejak Januari 2022

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian ATR/BPN
4. Kementerian PUPR
5. Kementerian Investasi/BKPM
6. Pemprov Kalimantan Timur
7. Pemkab Kutai Kartanegara
8. Pemkab Penajam Paser Utara

PERATURAN PELAKSANAAN PRIORITAS UU IKN YANG HARUS SELESAI AKHIR MARET 2022 DAN K/L TERKAIT

PERATURAN PRESIDEN

3. PERPRES OTORITA IKN

- i. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta P3 IKN;
- ii. Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN

Status: Dalam proses penyusunan (80%)

- 1. Kemen Setneg
- 2. Kemen Dalam Negeri
- 3. Kemen PAN-RB
- 4. Kemen ATR/BPN
- 5. Kemen PUPR
- 6. Kemen Keuangan

- 7. Kemen Investasi/BKPM
- 8. LKPP
- 9. Pemprov Kalimantan Timur
- 10. Pemkab Kutai Kartanegara
- 11. Pemkab PPU

4. PERPRES PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA

Status: Dalam proses penyusunan (65%)

- 1. Kemen Setneg
- 2. Kemen PUPR
- 3. Kemen Dalam Negeri
- 4. Kemen PAN-RB
- 5. Kemen LHK
- 6. Kemen ATR/BPN
- 7. Kemen Keuangan

- 8. Kemen Investasi/BKPM
- 9. Kemen Pertahanan
- 10. TNI
- 11. Kepolisian RI
- 12. Pemprov Kalimantan Timur
- 13. Pemkab Kutai Kartanegara
- 14. Pemkab PPU

5. PERPRES KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA

Status: Dalam proses penyusunan (80%)

- 1. Kemen Dalam Negeri
- 2. Kemen Setneg
- 3. Kemen KKP
- 4. Kemen PUPR
- 5. Kemen LHK
- 6. Kemen Perhubungan
- 7. Kemen Pertahanan

- 8. Kemen ESDM
- 9. Kemen Kominfo
- 10. BIG
- 11. Pemprov Kalimantan Timur
- 12. Pemkab Kutai Kartanegara
- 13. Pemkab PPU

PERATURAN PELAKSANAAN UU IKN LAINNYA (TARGET PENYELESAIAN TAHUN 2024)

NO.	JUDUL PERATURAN	INISIATOR/PIC	K/L TERKAIT	
6.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> Otorita Ibu Kota Nusantara 	1. Kemen PPN/BAPPENAS 2. Kemen Dalam Negeri 3. Kemen Setneg	4. Kemen PUPR 5. Kemen LHK 6. Kemen ATR/BPN
7.	Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri Otorita Ibu Kota Nusantara 	1. Kemen PPN/BAPPENAS 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen Setneg 4. Kemen PUPR	5. BIG 6. Pemprov Kaltim 7. Pemkab Kutai Kartanegara 8. Pemkab PPU
8.	Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional.	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PPN/Bappenas Otorita Ibu Kota Nusantara 	1. Kemen PAN-RB 2. Kemen PPN/BAPPENAS 3. Otorita Ibu Kota Nusantara 4. Kemen Luar Negeri	5. Pemprov DKI Jakarta 6. Pemprov Kaltim 7. Pemkab Kutai Kartanegara 8. Pemkab PPU
9.	Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sekretariat Negara 	1. Kemen PPN/BAPPENAS 2. Otorita Ibu Kota Nusantara	

PERATURAN PELAKSANAAN PRIORITAS (SELAIN YANG DIATUR DALAM UU IKN) YANG HARUS SELESAI AKHIR MARET 2022

PERATURAN MENTERI/ LEMBAGA

1. PERATURAN MENTERI PPN/BAPPENAS TENTANG KPBU KHUSUS IKN

Pemrakarsa:

Kementerian PPN/Bappenas

Status Penyusunan:

Telah dimulai sejak 2021

2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KPBU KHUSUS IKN

Pemrakarsa:

Kementerian Keuangan

Status Penyusunan:

Konfirmasi Kemenkeu

3. PERATURAN LKPP TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS IKN

Pemrakarsa:

LKPP

Status Penyusunan:

Telah dimulai sejak 2021

Pesan Utama Kesiapan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Persiapan Pembangunan IKN

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya mendapat dampak langsung dari pembangunan IKN.
2. Kabupaten Kukar akan menjadi daerah mitra IKN dengan standar dan peradaban baru.
3. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan IKN memerlukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan berbagai pihak: Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak lainnya.
4. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan beberapa langkah yang perlu disiapkan secara terencana dan dukungan berbagai pihak.

Manfaat Pembangunan IKN bagi rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Mendorong transformasi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih maju, terbuka, produktif, adaptif, inovatif dan partisipatif.
2. Mendorong percepatan pembangunan daerah menjadi lebih unggul dan berdaya saing.
3. Memperluas konektivitas antardaerah dan meningkatkan rantai nilai lokal, regional, nasional dan global.
4. **Dengan catatan:** Pemerintah Daerah dan masyarakat Kukar harus “disiapkan” dan “menyiapkan diri” dengan sikap, perilaku, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan standar baru.

Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Persiapan Pembangunan IKN



Latar Belakang



Motivasi

- a. Membangun **Ibu Kota Negara dengan identitas nasional**
- b. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi **Indonesia-sentris**
- c. Percepatan Pemulihan dan **Transformasi Ekonomi Nasional** pasca Covid-19
- d. Untuk mencapai target Visi 2045 menjadi negara maju



Tujuan Pelaporan

Arahan Presiden

Identitas Nasional	Cerdas, Hijau, Indah, dan Berkelanjutan	Pendorong Pemerataan Ekonomi di Kawasan Timur
Modern dan Berstandar Internasional	Tata Kelola yang Efektif dan Efisien	
1. Menganalisis kesiapan pembangunan Ibu Kota Negara	2. Menyusun rekomendasi pembangunan Ibu Kota Negara	

Visi IKN



- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat dampak langsung dari pembangunan IKN.
- Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi daerah mitra IKN.
- Keberhasilan pelaksanaan pembangunan IKN memerlukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan berbagai pihak: Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak lainnya.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan beberapa langkah yang perlu dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Manfaat Pembangunan IKN bagi Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara



Pembangunan Ibu Kota Negara dalam RPJMN 2020-2024
Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, tanggal 17 Januari 2020



Pembangunan IKN

Lokasi:
Wilayah Kab. Penajam
Paser Utara dan
Kab. Kutai Kartanegara



Manfaat

- 1 Memberikan akses yang lebih merata bagi NKRI
- 2 Mendorong pemerataan pembangunan ke luar Jawa
- 3 Reorientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris
- 4 Membangun kota percontohan yang *sustainable*, kota masa depan yang *the best on earth*



Kerangka Regulasi

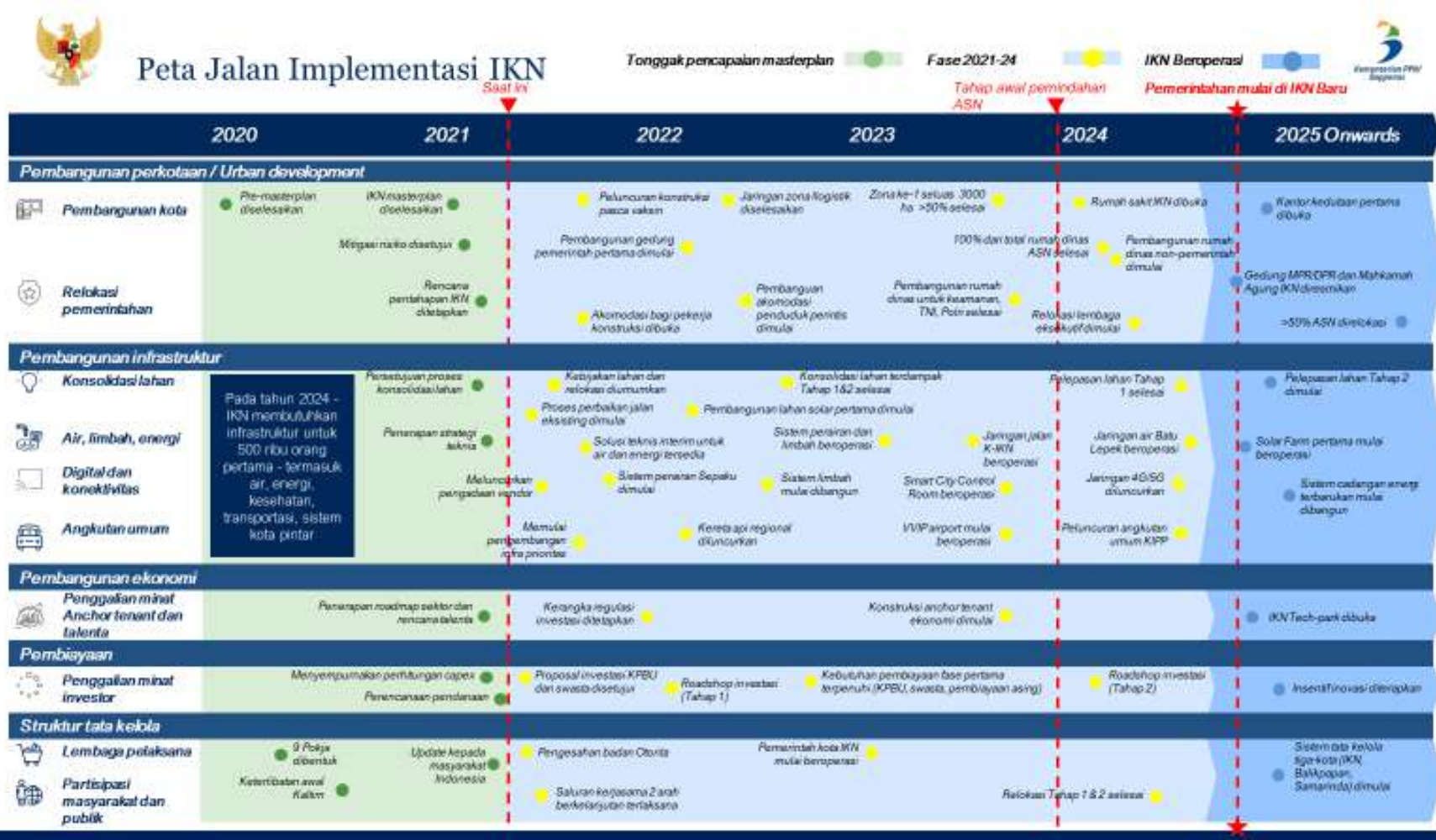
- 1 Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara
- 2 Revisi UU Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan
- 3 RPerpres Rencana Induk IKN
- 4 RPerpres Otorita Ibu Kota Negara
- 5 Rperpres RTR KSN IKN
- 6 RPP/RPerpres Insentif Swasta dalam Pembangunan IKN, RPP/RPerpres Skema Pembiayaan IKN
- 7 Peraturan Kepala Otorita untuk RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN, RDTR BWK IKN

Sasaran

- 2020 :**
Penyiapan Regulasi dan Kelembagaan, Penyusunan Master Plan, Penyusunan Urban Design dan Perencanaan RTR KSN, RDTR IKN.
- 2021 :**
Pengadaan lahan untuk akses jalan dan sarana prasarana, penyusunan DED kawasan, *ground breaking* pemb. IKN, pembangunan sarpras sumber daya air dan energi, pembangunan bangunan strategis dan sarana prasarana dasar penunjang, pembangunan infrastruktur transportasi
- 2022**
Pembangunan lanjutan dan pembangunan perkantoran, rumah dinas, sarana pendidikan & kesehatan, serta sarpras dasar penunjang
- 2023**
Pembangunan lanjutan dan penyiapan lahan *diplomatic compound*
- 2024:**
Pembangunan lanjutan dan awal pemindahan ke IKN

- Mendorong transformasi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih maju, terbuka, produktif, adaptif, inovatif dan partisipatif.
- Mendorong percepatan pembangunan daerah menjadi lebih unggul dan berdaya saing.
- Memperluas konektivitas antardaerah dan meningkatkan rantai nilai lokal, regional, nasional dan global.
- **Dengan catatan:** Pemerintah Daerah dan masyarakat Kukar harus “disiapkan” dan “menyiapkan diri” dengan sikap, perilaku, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan standar baru.

Peta Jalan Pelaksanaan Pembangunan IKN dan Langkah Persiapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



Langkah yang dilakukan Pemda Kutai Kartanegara adalah:

1. Memahami peta jalan Pelaksanaan Pembangunan IKN terutama rencana aksi, jadwal dan pembagian tugas;
2. Mengkaji kegiatan yang harus dilakukan Pemda dalam mendukung IKN,
3. Mengkaji status kesiapan Pemda Kukar dalam mendukung Peta Jalan IKN;
4. Menyusun Rencana Tindak, Pembiayaan dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemda Kukar;
5. Melakukan dialog, diskusi, koordinasi dan musyawarah dalam penyepakatan rencana tindak, pembiayaan dan jadwal.
6. Melakukan koordinasi tentang kompensasi fiskal dari berkurangnya wilayah Kukar untuk IKN.

Bidang, Ruang Lingkup dan Kegiatan Rencana Pembangunan IKN

Bidang	Ruang Lingkup	Kegiatan dan Output
Tata Ruang dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan RTRW dan RDTR Penyiapan Lahan (<i>clean and clear</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Revisi RTRW dan RDTR Pembebasan Lahan (<i>clean and clear</i>) Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria
Pengembangan Wilayah dan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Rencana Induk Penyiapan <i>Urban Design</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Masukan Pemda thd Rencana Induk Penyiapan Kawasan Kecamatan Lokasi IKN Penyiapan Kawasan Bisnis Pendukung IKN
Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan KLHS Penyiapan Kajian Risiko Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan KLHS Kabupaten Penyiapan Kajian dan Peta Risiko Bencana Penyiapan Ketangguhan dan Ketahanan Bencana
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Infrastruktur Dasar Penyiapan Jaringan Transportasi Penyiapan Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Infrastruktur Dasar Pembangunan Jaringan Transportasi Penmbangunan Perumahan dan Permukiman
Tata Kelola dan Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Badan Pengelola IKN Penyiapan Tata Kelola 	<ul style="list-style-type: none"> Penegasan Pembagian Tugas dan Peran Pemda Pola Kerja Pemda dan Badan Pengelola Pola Alokasi DAU, DAK dan Bagi Hasil yang Adil
Pengembangan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Prioritas Sektor Penyiapan <i>Superhub</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Industri Unggulan Pengembangan Jasa Unggulan Penguatan Rantai Nilai Ekonomi
Aparatur (ASN, TNI dan POLRI)	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Optimalisasi ASN Pemda Penyiapan Pemindahan (Mobilitas) 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi ASN Pemda dalam Pelayanan IKN Peningkatan Kapasitas ASN Pemda Penyiapan Tunjangan dan Insentif
Sosial, Budaya dan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Kajian Dampak Sosial Penyiapan SDM Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan Kesempatan Penduduk Kukar Peningkatan Keterampilan Penduduk Kukar Pengembangan Manajemen Konflik Sosial
Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Kawasan Hankam Penyiapan Kerjasama Hankam 	<ul style="list-style-type: none"> Penjaminan Perlindungan Penduduk Kukar Penyiapan Skema Kerjasama TNI/Polri dan Pemda
Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Rencana Investasi Penyiapan Sumber Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Penghitungan Rencana Investasi Pengembangan Skema KPBU Pengembangan Skema Lain seperti CSR

Status Kesiapan Pemda Kutai Kartanegara dalam Persiapan Pembangunan IKN

Tata Ruang dan Pertanahan

● Belum siap

● dalam proses

● Sudah siap

	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	• Revisi RTRW dan RDTR	• Penyiapan Materi Teknis RTRW • Penyiapan Revisi RTRW • Penyiapan Perda RTRW	● ● ●	• Pembahasan Materi Teknis Revisi RTRW • Penyiapan RanPerda	• Bappeda, Dinas PU, Bappenas, Kement ATR/BPN, Sekneg, K/L	Des 2021 2021-2022
	• Pembebasan Lahan (<i>clean and clear</i>)	• Penilaian dan Penetapan Lokasi • Pemetaan Lokasi Lahan	● ●	• Finalisasi Lokasi IKN Inti dan Pendukung • Finalisasi Peta Lokasi IKN	• Bappenas, Kement ATR/BPN, Sekneg, K/L • Pemda Kukar	2021-2022 2021-2022
	• Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria	• Pemetaan Potensi Konflik Kepemilikan Lahan • Penyiapan Manajemen Konflik Kepemilikan Lahan	● ●	• Penyiapan Data dan Peta Kepemilikan Lahan • Penyiapan Manajemen Konflik Kepemilikan Lahan	• Kantor Pertanahan, Kement ATR/BPN • Pemda Kukar	2021-2022 2021-2022

Pengembangan Wilayah dan Kawasan

	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	• Penyiapan Masukan Pemda thd Rencana Induk	• Penyiapan <i>Policy Brief</i> • Penyiapan Usulan Kegiatan • Penyiapan Dukungan Kegiatan	● ● ●	• Penyusunan Policy Brief • Penyiapan Usulan Kegiatan	• Bappeda dan Dinas/OPD Pemda Kukar	Februari 2022
	• Penyiapan Kawasan Kecamatan Lokasi IKN	• Penyiapan Pedoman Revitalisasi Kecamatan Lokasi IKN • Penyiapan Masterplan Kecamatan Lokasi IKN	● ●	• Finalisasi Pedoman Revitalisasi Kecamatan Lokasi IKN • Penyusunan Masterplan Kecamatan Lokasi IKN	• Bappeda dan Dinas/OPD • Bappeda dan Dinas/OPD	Maret 2022 Maret 2022 2021
	• Penyiapan Kawasan Bisnis Pendukung IKN	• Penyiapan Studi Kelayakan Kawasan Bisnis • Penyiapan Masterplan Kawasan Bisnis	● ●	• Pelaksanaan Studi Kelayakan Kawasan Bisnis • Penyusunan Masterplan Kawasan Bisnis	• Bappeda dan Dinas PUPera • Bappeda dan Dinas PUPera	2022 2022

Status Kesiapan Pemda Kutai Kartanegara dalam Persiapan Pembangunan IKN

Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

● Belum siap

● dalam proses

● Sudah siap

	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	• Penyiapan KLHS Kabupaten	• Penyesuaian KLHS Kukar dengan Rencana Induk dan RTRW IKN	●	• Revisi KLHS Kukar sesuai Rencana Induk dan RTRW IKN • Sosialisasi Revisi KLHS kepada berbagai pihak	• Bappeda dan Dinas KLHK	2022
	• Penyiapan Kajian dan Peta Risiko Bencana Kabupaten dan	• Penyesuaian Kajian Resiko Bencana sesuai Rencana Induk dan RTRW IKN • Penyiapan Peta Risiko Bencana	●	• Revisi Kajian Risiko Bencana sesuai dengan Rencana Induk dan RTRW IKN • <i>Updating</i> Peta Risiko Bencana	• Bappeda, BPBD dan Dinas PUPera	Feb 2022 Feb 2022
	• Peningkatan Ketahanan dan Ketangguhan Bencana	• Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat • Penyiapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	●	• Edukasi, Literasi dan Bidaya Sadar Bencana Masyarakat • Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	• BPBD, Dinas PMD dan Dinas Pendidikan	2022 2022

Infrastruktur

	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	• Pembangunan Infrastruktur Dasar	• Penyiapan Jaringan Air Bersih • Pembangunan Jaringan Listrik • Penyiapan Pengelolaan Limbah, Sampah dan Sanitasi	●	• Penyiapan Studi Kelayakan dan Proposal Pembangunan Jaringan • Penyiapan Usulan Kegiatan dan Anggaran Pembangunan	• Bappeda, Dinas PUPera dan Dinas/OPD lain Pemda Kukar	2022
	• Pembangunan Jaringan Transportasi	• Penyiapan Jaringan Transportasi Darat • Penyiapan Jaringan Transportasi Laut dan Sungai	●	• Penyiapan Studi Kelayakan dan Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan • Penyiapan Studi Kelayakan dan Proposal Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga	• Bappeda, Dinas PUPera dan Dinas/OPD lain Pemda Kukar	2022 2022
	• Penmbangunan Perumahan dan Permukiman	• Penyiapan Penataan, Rehabilitasi dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	●	• Penataan Kawasan Kumuh • Rehabilitasi Perumahan dan Lingkungan Permukiman • Pembangunan Perumahan	• Bappeda, Dinas PUPera dan Dinas/OPD lain Pemda Kukar	2022

Status Kesiapan Pemda Kutai Kartanegara dalam Persiapan Pembangunan IKN

Tata Kelola dan Pengorganisasian

● Belum siap

● dalam proses

● Sudah siap




	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> Penegasan Pembagian Tugas dan Peran Pemda Kukar dan Badan Pengelola IKN 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Tugas dan Peran Pemda Penyesuaian Tata Kelola Organisasi Pemda Kukar 	●	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan dan Penegasan Tugas dan Peran Pemda Kukar Pembaharuan Tata Kelola Organisasi Pemda Kukar 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda dan Dinas/OPD Pemda Kukar 	2022
	<ul style="list-style-type: none"> Pola Kerja Pemda Kukar dan Otorita IKN 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Usulan Pola Kerja Pemda dan Otorita IKN 	●	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Usulan Pola Kerja Pemda dan Otorita IKN Finalisasi Usulan Pola Kerja Pemda dan Otorita IKN 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda dan Dinas/OPD Bappeda dan Dinas/OPD 	2022
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Pola Alokasi DAU, DAK dan Bagi Hasil Kabupaten Kukar yang lebih Adil 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Usulan Perbaikan Pola dan Skema Alokasi DAU, DAK dan Bagi Hasil Kabupaten Kukar yang lebih Adil 	●	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Studi Usulan Perbaikan Pola dan Skema Alokasi DAU, DAK dan Bagi Hasil Kabupaten Kukar Perubahan Kelayakan Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda dan Dinas PUPera Bappeda dan Dinas Pupera 	2022

Pengembangan Ekonomi




	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Kukar 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Kajian Potensi Industri Unggulan Berbasis Sumber Daya 	●	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kebijakan Pengembangan Industri Unggulan Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan dan Industri Kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata 	2022
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Jasa Unggulan Kabupaten Kukar 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Kajian Pengembangan Jasa Unggulan 	●	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kebijakan Pengembangan Jasa Perdagangan, Perhotelan dan Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata dan Dinas Lainnya 	2022
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Rantai Nilai Komoditas Unggulan Kabupaten Kukar 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Studi Penguatan Rantai Nilai Komoditas Unggulan 	●	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Studi Kelayakan Kawasan Penyusunan Masterplan Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas KKP, Dinas Perindag 	2022 2022

Status Kesiapan Pemda Kutai Kartanegara dalam Persiapan Pembangunan IKN

Aparatur (ASN, TNI dan POLRI)

	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	• Optimalisasi ASN Pemda dalam Pelayanan IKN	• Penyiapan Alih Status dan Penugasan ASN Pemda ke Pelayanan IKN		• Penyusunan Usulan Alih Status dan Penugasan ASN Pemda ke Pelayanan IKN	• Sekda dan BPSDM	2022
	• Peningkatan Kapasitas ASN Pemda	• Peningkatan Kapasitas ASN Pemda Kabupaten Kukar sesuai standar pelayanan IKN		• Penyusunan Usulan Peningkatan Kapasitas ASN Pemda Kabupaten Kukar	• Sekda dan BPSDM	2022
	• Penyiapan Penyetaraan Tunjangan dan Insentif	• Penyetaraan standar Tunjangan dan Insentif ASN Pemda Kabupaten Kukar dengan ASN IKN		• Penyusunan Kajian Penyetaraan Insentif dan Tunjangan ASN	• Sekda dan BPSDM	2022 2022

Sosial, Budaya dan Kependudukan

	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	• Perluasan Kesempatan Penduduk Kukar dalam Pembangunan IKN	• Pelibatan Kontraktor Kukar • Pelibatan Tenaga Kerja Kukar		• Penyusunan Pola Kerjasama Pelibatan Kontraktor Kukar • Penyusunan Pola Kerjasama Pelibatan Tenaga Kerja Kukar	• Sekda dan Dinas PUPera • Dinas Tenaga Kerja	2022
	• Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Penduduk Kukar sesuai standar pelayanan IKN	• Penyiapan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan dan Keahlian Penduduk		• Pelaksanaan Diklat Keterampilan dan Keahlian Manajemen (SDM, SDA dan LH, infrastruktur, investasi, Kawasan), akuntasni dan Teknologi Informasi	• Sekda, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan BPSDM	2022
	• Pengembangan Manajemen Konflik Sosial	• Peningkatan Interaksi dan Kerjasama Penduduk Kukar dan Penduduk IKN		• Pelaksanaan Diklat Manajemen Konflik Sosial • Pelibatan Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Perempuan dan Pemuda	• Dinas Sosial Dinas PMD dan Dinas Pendidikan	2022

Status Kesiapan Pemda Kutai Kartanegara dalam Persiapan Pembangunan IKN

Pertahanan dan Keamanan

● Belum siap

● dalam proses

● Sudah siap

	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	• Penjaminan Perlindungan Penduduk Kukar	• Pencegahan dan Pengurangan Kasus Tindak Kriminal, Perdagangan Obat Terlarang dan Minuman Keras, dan Perdagangan Manusia	●	• Penyiapan Rencana Aksi Pencegahan dan Pengurangan Kasus Tindak Kriminal, Perdagangan Obat Terlarang dan Minuman Keras, dan Perdagangan Manusia	• Sekda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Satpol PP dan TNI/Polri	2022
	• Pengembangan Ketertiban dan Keamanan Kawasan	• Peningkatan Kapasitas Satpol PP	●	• Penataan Manajemen Satpol PP • Peningkatan Pendidikan, Edukasi dan Literasi Satpol PP	• Sekda, Dinas Satpol PP dan BPSDM	2022-2023
	• Penguatan Kerjasama Pemda dan TNI/Polri	• Penyiapan Skemadan Pola KerjasamaPemda dan TNI/Polri	●	• Penyusunan Skema dan Pola KerjasamaPemda dan TNI/Polri	• Sekda, Dinas Satpol PP dan TNO/Polri	2022-2023

Pembiayaan

	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Status	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu
	• Penghitungan Rencana Investasi	• Penyiapan Prioritas Bidang Investasi Kabupaten Kukar	●	• Penyusunan Rencana Investasi • Penyederhanaan Perijinan Invetasi • Peningkatan Promosi Investasi	• Bappeda, Dinas Penanaman Modal Daerah, dan Dinas/OPD Pemda Kukar	2022
	• Pengembangan Skema KPBU	• Penyiapan Rencana Kegiatan Prioritas Skema KPBU	●	• Peningkatan Kapasitas Penyusunan Rencana Investasi • Penyiapan Proyesk Prioritas KPBU • Peningkatan Promosi KPBU	• Bappeda, Dinas Penanaman Modal Daerah, dan Dinas/OPD Pemda Kukar	2022
	• Pengembangan Skema Lain seperti CSR dan Manajemen Aset	• Penyiapan Rencana Kegiatan Prioritas Skema CSR dan Manajemen Aset	●	• Peningkatan Komunikasi dan Dialog dengan Swasta • Penyiapan Proyesk Prioritas CSR • Peningkatan Promosi CSR	• Bappeda, Dinas Penanaman Modal Daerah, dan Dinas/OPD Pemda Kukar	2022

Perbaikan dan Penyempurnaan Rencana Tindak Peningkatan Kesiapan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Mendukung Pembangunan IKN IKN

Pemda Kutai Kartanegara akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Tindak dengan memperhatikan:

1. Penyusunan dan Penyelesaian Rencana Induk Pembangunan IKN,
2. Penyusunan dan Penyelesaian RTRW dan RDTR IKN,
3. Penyusunan dan Penyelesaian Regulasi Pembangunan IKN termasuk UU dan PP,
4. Perkembangan Pembentukan Otorita IKN,
5. Perhitungan Investasi Pembangunan IKN.

Pemda Kutai Kartanegara akan melakukan percepatan langkah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara,
2. Penyiapan SDM Aparatur dan Masyarakat,
3. Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan,
4. Konsolidasi dan Penataan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara,
5. Komunikasi, Dialog dan Sosialisasi kepada Masyarakat,
6. Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga dalam penghitungan kompensasi fiskal sebagai akibat berkurangnya wilayah Kukar untuk pembangunan IKN, serta pengembangan kerjasama investasi.